

ABSTRAK

Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti rugi. Dalam Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa apabila dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Yang dimaksud dengan "tidak lagi dapat difungsikan" adalah bidang tanah yang tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian. Sehubungan hal tersebut, pihak yang menguasai/ memiliki tanah dapat meminta Ganti Kerugian atas seluruhnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, satu, Mengkaji pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. dua, Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. tiga, Mengkaji dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.

Metode pendekatan pada penulisan ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut dengan penelitian hukum normatif dan juga Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata .dengan menjawab permasalahan pokok dalam penulisan TESIS ini yaitu satu, Bagaimana Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. dua, Apa permasalahan-permasalahan yang diadapi dalam Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Peembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali. tiga, Bagaimana dampak hukum Pelaksanaan penerapan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci : Penerapan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

Abstract

Implementation of the application of Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency. The value of compensation based on the results of the Appraiser's assessment becomes the basis for deliberation to determine compensation. In Article 35 of Law no. 2 of 2012 it is stated that if in the case of certain land parcels that are affected by land acquisition there are remnants that can no longer be functioned according to their designation and use, the entitled Party may request a complete replacement of the land parcel. What is meant by "no longer able to function" is a parcel of land that can no longer be used according to its original designation and use, for example a residential house which is divided so that part of it cannot be used as a residential house. In connection with this, the party who controls/owns the land may request Compensation for the entire amount. The objectives of this study are as follows, one, to examine the implementation of the application of Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency. two, Knowing the problems faced in the implementation of article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency. three, to examine the legal impact of the implementation of article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency.

The approach method in this writing uses the method. This research uses a type of doctrinal research or is called normative legal research and also the data analysis technique in this study uses descriptive qualitative analysis, namely by aligning and describing the real situation. By answering the main problems in writing this THESIS, namely one, How to implement article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency. two, What are the problems faced in the implementation of article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency. three, What are the legal implications of the implementation of Article 35 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for the Public Interest Development of the Trans Java Toll Road in Boyolali Regency.

Keywords: *Application, Land Acquisition, Public Interest*